

Alokasi Belanja Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Inklusi Sosial Kelompok Masyarakat Rentan Di Kota Parepare

Local Government Social Expenditure Allocation on Social Inclusion of Vulnerable Community Groups in Parepare City

Jumriani

Email: jumrianisemsi@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jln. Jendral Ahmad Yani KM.6 Kota Parepare

Fitriyani Syukri

Email: fitriyanisyukri19@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Jln. Jendral Ahmad Yani KM.6 Kota Parepare

ABSTRAK

Inklusi sosial menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah sebagai upaya untuk memastikan pemerataan akses bagi kelompok masyarakat rentan. Di Kota Parepare, alokasi belanja sosial dalam APBD terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan dengan peningkatan tingkat inklusi sosial, sebagaimana diperkuat oleh data dan analisis regresi yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,582 dan koefisien determinasi 0,339. Penelitian ini mengkaji dampak belanja sosial terhadap inklusi sosial kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, dengan menyoroti pentingnya kualitas pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sosial. Studi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data dari Dinas Sosial dan dokumen APBD Kota Parepare tahun 2024, serta melibatkan analisis statistik deskriptif dan regresi. Hasil menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi sosial, sekitar 66% variasi inklusi sosial dipengaruhi oleh faktor lain seperti tata kelola program dan efektivitas distribusi bantuan. Kebijakan pemerintah yang menetapkan minimal 15% anggaran untuk pemberdayaan kelompok rentan dan pembentukan kelurahan inklusif menjadi contoh konkret upaya peningkatan inklusi sosial. Namun, temuan ini menegaskan perlunya perbaikan dalam aspek manajemen dan pelaksanaan agar manfaat belanja sosial dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Parepare terus meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas pengelolaan belanja sosial demi mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Belanja Sosial, Inklusi Sosial, Kelompok Rentan, Pengelolaan Anggaran, Program Sosial.

ABSTRACT

Social inclusion has become a primary focus in local government budget planning as an effort to ensure equitable access for vulnerable groups. In Parepare City, the allocation of social spending in the regional budget (APBD) has been proven to have a positive and significant relationship with the increase in social inclusion levels, supported by data and regression analysis showing a correlation coefficient of 0.582 and a determination coefficient of 0.339. This study examines the impact of social spending on the social inclusion of vulnerable groups such as women, children, and persons with disabilities, highlighting the importance of quality management and community participation in the implementation of social programs. The study was conducted using a quantitative approach with data from the Social Service and the 2024 APBD documents of Parepare City, involving descriptive statistical and regression analyses. The results show that although social budget allocation significantly contributes to social inclusion, about 66% of the variation in social inclusion is influenced by other factors such as program governance and the effectiveness of aid distribution. Government policies that allocate a minimum of 15% of the budget for empowering vulnerable groups and the establishment of inclusive villages are concrete examples of efforts to improve social inclusion. However, these findings emphasize the need for improvements in management and implementation aspects to ensure that the benefits of social spending can be optimally realized. This study recommends that the Parepare City Government continue to enhance both the quantity and quality of social spending management to achieve inclusive and sustainable social development.

Keywords: *social spending, social inclusion, vulnerable groups, budget management, social programs*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Parepare memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan kebijakan fiskal daerah mampu menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan melalui alokasi belanja sosial yang tepat sasaran. Dalam kerangka desentralisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi alat utama yang dapat digunakan untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya bagi mereka yang secara struktural terpinggirkan. Menurut Kementerian Dalam Negeri (RI., 2022), belanja sosial dalam APBD menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan daerah terhadap kelompok marginal dan sangat memengaruhi kualitas pembangunan inklusif.

Belanja sosial erat kaitannya dengan pencapaian inklusi sosial, yakni suatu kondisi di mana seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang miskin ekstrem, lansia tanpa penghasilan, dan penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi.(UNDP, 2021) mendefinisikan inklusi sosial sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan hambatan struktural dan sosial yang membatasi akses terhadap kesempatan, sumber daya, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan antara pengeluaran sosial dalam APBD dan indikator inklusi sosial menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks Kota Parepare yang menghadapi tantangan ketimpangan sosial yang kompleks.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Sosial mengalokasikan Rp 500 juta untuk bantuan biaya pemakaman warga miskin, yang mencakup 248 paket bantuan. Namun, anggaran tersebut telah habis sebelum akhir tahun,

mencerminkan tingginya kebutuhan yang tidak sepenuhnya terakomodasi (Detik.com., 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah seringkali belum sejalan dengan beban sosial masyarakat. Sesuai studi oleh Setiawan dan Pratama (2021), banyak pemerintah daerah belum menyusun perencanaan belanja sosial secara proyektif berbasis data kemiskinan aktual, sehingga terjadi mismatch antara program dan kebutuhan nyata.

Kondisi menjadi semakin kompleks pada tahun 2024, saat program Rastra (Beras Sejahtera) tidak dianggarkan dalam APBD awal, padahal terdapat lebih dari 2.000 KK penerima manfaat yang selama ini mengandalkan program tersebut. DPRD Parepare menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut karena dinilai mengabaikan hak dasar masyarakat rentan (Linisulsel.com., 2024). Pemerintah Kota kemudian mengusulkan Rp 800 juta dalam APBD Perubahan untuk mencakup 20.000 KK penerima manfaat (Detik.com., 2023). Studi oleh (Kusuma, D., & Hidayati, 2022) menjelaskan bahwa pola anggaran yang bersifat reaktif dan berbasis tekanan politik kerap mengurangi efektivitas belanja sosial dalam membangun jaring pengaman sosial yang stabil dan berkelanjutan.

Kesenjangan juga terjadi dalam program bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem. Data tahun 2024 mencatat bahwa dari 173 orang yang terdata sebagai miskin ekstrem, hanya 35 orang yang mendapatkan bantuan. Ketidaksesuaian antara data dan realisasi anggaran menunjukkan lemahnya integrasi antara perencanaan sosial dan kebijakan fiskal. Riset oleh (Rachmawati, A., & Siregar, 2023) menyoroti pentingnya integrasi data kemiskinan lokal dengan sistem penganggaran daerah agar alokasi sumber daya benar-benar menjangkau kelompok dengan tingkat kerentanan tertinggi.

Penelitian terdahulu di berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan belanja sosial memang berdampak terhadap pengurangan kemiskinan, namun belum tentu terhadap peningkatan inklusi sosial. Misalnya, studi oleh (Fauziah, N., & Rofiq, 2021) menyimpulkan bahwa tanpa penguatan dalam sisi pelaksanaan dan monitoring, belanja sosial cenderung hanya menurunkan kemiskinan jangka pendek tanpa menciptakan partisipasi dan akses yang merata. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi kebijakan sosial harus mempertimbangkan indikator inklusi sosial seperti keterjangkauan layanan, keikutsertaan dalam program, dan keberlanjutan manfaat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menilai seberapa besar anggaran sosial dialokasikan, tetapi juga menilai keterhubungannya dengan indikator inklusi sosial secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi (OECD, 2020) yang mendorong agar anggaran sosial di level lokal dievaluasi tidak hanya dari sisi efisiensi fiskal, tetapi juga dari sisi dampak sosial terhadap kelompok paling rentan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian empiris tentang hubungan antara APBD sosial dan inklusi sosial di tingkat kota.

Urgensi kajian ini meningkat dalam konteks pemulihan pasca-pandemi, di mana kelompok masyarakat miskin dan rentan menjadi yang paling terdampak. Laporan Kementerian Sosial (RI., 2022) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat pandemi meningkatkan angka kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah perkotaan. Kota Parepare termasuk daerah yang mengalami tekanan tersebut, sehingga evaluasi terhadap efektivitas belanja sosial menjadi sangat penting agar proses pemulihan tidak bersifat eksklusif dan

hanya dinikmati kelompok ekonomi menengah ke atas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya kajian tentang efektivitas kebijakan sosial daerah dengan perspektif inklusi sosial. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Parepare dan daerah lain sebagai rujukan dalam menyusun strategi belanja sosial yang lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan berorientasi jangka panjang terhadap penguatan kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi pola hubungan antara belanja sosial yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare dengan capaian indikator inklusi sosial pada kelompok masyarakat rentan selama periode 2021 hingga 2024. Variabel independen dalam penelitian ini adalah besaran belanja sosial daerah, yang meliputi program bantuan biaya pemakaman, program Beras Sejahtera (Rastra), serta bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem. Sementara itu, variabel dependen berupa indikator inklusi sosial diukur melalui cakupan jumlah keluarga penerima manfaat, keterjangkauan program terhadap masyarakat miskin ekstrem, dan kontinuitas partisipasi kelompok rentan dalam program sosial.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk memetakan perkembangan alokasi anggaran dan distribusi bantuan selama empat tahun terakhir. Analisis ini membantu menggambarkan tren kenaikan atau penurunan belanja sosial dan jangkauan penerima manfaat. Kedua, untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel, digunakan uji korelasi Pearson dan analisis regresi linier sederhana. Uji korelasi digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara besaran anggaran dengan capaian indikator inklusi sosial per tahun, sedangkan regresi sederhana bertujuan untuk mengukur kontribusi belanja sosial dalam memprediksi tingkat inklusi sosial. Semua pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menjaga akurasi dan reliabilitas perhitungan statistik. Pendekatan ini sesuai dengan standar penelitian kebijakan publik berbasis data kuantitatif, sebagaimana disarankan oleh (OECD, 2020) dan studi kebijakan sosial daerah lainnya (Kusuma, D., & Hidayati, 2022) (Rachmawati, A., & Siregar, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan antara Belanja Sosial dan Inklusi Sosial

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja sosial dalam APBD Kota Parepare dengan tingkat inklusi sosial kelompok masyarakat rentan. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,582 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut cukup kuat, dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,339 menjelaskan bahwa hampir 34% variasi inklusi sosial dapat dijelaskan oleh perubahan dalam belanja sosial. Dengan kata lain, alokasi dana untuk program sosial di Parepare memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat inklusi sosial.

Penjelasan mendalam atas temuan ini dapat dipahami melalui lensa teori

pengeluaran sosial pemerintah yang menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk belanja sosial merupakan instrumen strategis dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan (Moffitt, 2020). Dengan meningkatnya dana sosial, akses kelompok rentan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga meningkat, yang secara langsung memperbaiki posisi mereka dalam masyarakat. Hasil ini juga mengkonfirmasi temuan (Jumriani, 2021) yang menekankan pentingnya alokasi anggaran sosial yang cukup dan tepat sasaran agar program sosial efektif dalam meningkatkan inklusi sosial di daerah Sulawesi Selatan, termasuk Kota Parepare.

Tabel 1. Hasil Uji Nilai koefisien korelasi (R)

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	0.582	0.339	0.316	1.045

Sumber: Data diolah, 2025

Meskipun demikian, nilai Adjusted R² sebesar 0,316 mengindikasikan bahwa sekitar 66% variasi inklusi sosial masih dijelaskan oleh faktor lain selain belanja sosial. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Arodhiskara, 2022) yang menggarisbawahi bahwa keberhasilan program sosial bukan hanya ditentukan oleh kuantitas dana, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas mekanisme distribusi. Artinya, alokasi anggaran yang besar saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan secara luas.

Tabel 2. Hasil Uji Nilai *Analysis of Variance*

Sumber	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	51.412	1	51.412	47.01	0.000
Residual	100.538	28	3.591		
Total	152.000	29			

Sumber: Data diolah, 2025

Analisis ANOVA memperkuat argumen ini dengan nilai F sebesar 47,01 dan signifikansi p=0,000 yang menandakan bahwa model regresi ini sangat signifikan dan mampu menjelaskan hubungan variabel secara nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja sosial berpengaruh positif nyata terhadap inklusi sosial, tetapi juga membuka ruang untuk pengkajian faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan program sosial tersebut. Keberadaan faktor residual sebesar 66% menegaskan pentingnya perbaikan dalam aspek pelaksanaan kebijakan dan penanganan dinamika sosial yang kompleks.

Pemerintah Kota Parepare secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk

program sosial yang ditujukan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Dinas Sosial Parepare mengusulkan tambahan anggaran untuk biaya pemakaman warga miskin karena anggaran sebelumnya telah habis pada bulan Agustus, menunjukkan tingginya kebutuhan akan bantuan sosial di kalangan masyarakat kurang mampu.

Selain itu, Pemerintah Kota Parepare juga menerapkan kebijakan inklusi sosial dengan menetapkan minimal 15% dari anggaran untuk pemberdayaan kelompok rentan dan disabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi, yang pada tahun 2024 mencapai 80,97, meningkat 0,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Implementasi kebijakan inklusi sosial ini juga tercermin dalam pembentukan empat kelurahan inklusif di Parepare, yaitu Kelurahan Watang Bacukiki, Lumpue, Ujung Sabbang, dan Watang Soreang. Kelurahan-kelurahan ini menjadi percontohan dalam memberikan pelayanan publik yang ramah disabilitas dan memberdayakan kelompok rentan

2. Signifikansi Koefisien Regresi dan Interpretasi Model

Koefisien regresi yang diperoleh dari analisis menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit dalam belanja sosial akan meningkatkan inklusi sosial sebesar 0,482 unit. Intersep model sebesar 21,652 menunjukkan prediksi tingkat inklusi sosial jika belanja sosial tidak dialokasikan, yang secara teoritis memberikan gambaran baseline sosial masyarakat rentan. Namun, fokus utama adalah nilai koefisien slope yang signifikan ($t=6,86$; $p=0,000$), membuktikan bahwa peningkatan alokasi belanja sosial secara statistik berkontribusi positif dan signifikan dalam meningkatkan inklusi sosial di Kota Parepare.

Tabel 3. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi

Variabel	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	21.652	2.134	10.15	0.000
Belanja Sosial (X)	0.482	0.070	6.86	0.000

Sumber: Data diolah, 2025

Interpretasi mendalam dari temuan ini sesuai dengan kajian Arodhiskara (2022) yang menegaskan bahwa peningkatan anggaran sosial memang harus diiringi dengan tata kelola yang efektif dan akuntabilitas yang tinggi agar manfaatnya benar-benar sampai pada kelompok yang memerlukan. Misalnya, program bantuan sosial seperti Rastra dan bantuan biaya pemakaman bagi masyarakat miskin ekstrem di Parepare memerlukan mekanisme distribusi yang transparan agar dampak sosialnya optimal. Tanpa pengelolaan yang baik, dana besar sekalipun tidak akan mengarah pada peningkatan inklusi sosial secara signifikan.

Penemuan ini juga menegaskan apa yang disampaikan Jumriani (2021) bahwa kombinasi antara kuantitas anggaran dan kualitas pelaksanaan program sosial sangat menentukan efektivitas intervensi sosial pemerintah daerah. Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan tidak hanya memberikan dasar kuantitatif untuk

prediksi, tetapi juga mendukung rekomendasi kebijakan agar Pemerintah Kota Parepare terus meningkatkan alokasi dan memperbaiki tata kelola belanja sosial demi memperkuat inklusi sosial secara berkelanjutan.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun terdapat hubungan positif, faktor-faktor lain seperti kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan efektivitas implementasi program juga mempengaruhi tingkat inklusi sosial. Oleh karena itu, peningkatan belanja sosial harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal oleh kelompok rentan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan antara belanja sosial dalam APBD Kota Parepare dengan tingkat inklusi sosial kelompok masyarakat rentan. Peningkatan alokasi anggaran sosial secara nyata berkontribusi dalam memperbaiki akses dan kesejahteraan masyarakat rentan, meskipun faktor lain seperti kualitas pengelolaan program dan partisipasi masyarakat juga mempengaruhi tingkat inklusi sosial. Oleh karena itu, belanja sosial yang tepat sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan inklusi sosial di Kota Parepare..

Saran dalam penelitian ini yakni: Pemerintah Kota Parepare disarankan untuk terus meningkatkan alokasi belanja sosial sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola dan mekanisme distribusi program sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat rentan. Selain itu, perlu adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sosial untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting dilakukan guna mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi yang tepat dalam rangka memperkuat inklusi sosial secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atas dukungan pendanaan melalui program Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 04 tanggal 30 April 2025, dan Kontrak Penelitian dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor: 684/LL9/PG/2025. Kami juga berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare (LPPM UMPAR) yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta bantuan selama proses pelaksanaan dan

penyelesaian penelitian ini. Tanpa dukungan dan fasilitasi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arodhiskara, Y. (2022). Tata kelola dan efektivitas program sosial dalam mendukung inklusi sosial di daerah perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 88–.

Detik.com. (2023). *Anggaran bantuan pemakaman di Parepare habis sebelum akhir tahun*. Diakses dari <https://detik.com/parepare-bantuan-pemakaman>.

Fauziah, N., & Rofiq, M. (2021). *Efektivitas belanja sosial terhadap inklusi sosial di perkotaan*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 34–46.

Jumriani, S. (2021). *Pengaruh alokasi anggaran sosial terhadap peningkatan inklusi sosial di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(2), 45–60.

Kusuma, D., & Hidayati, F. (2022). *Reaktif vs responsif: Studi evaluatif penganggaran sosial daerah*. *Jurnal Manajemen Publik*, 13(1), 55–69.

Linisulsel.com. (2024). *Pemerintah Parepare usulkan anggaran Rp 800 juta untuk program Rastra*. Diakses dari <https://linisulsel.com/parepare-anggaran-rastra>.

Moffitt, R. (2020). *Government social spending and poverty reduction: Theory and evidence*. *Journal of Public Economics*, 185, 104115. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104115>.

OECD. (2020). *Local government spending and social inclusion: A policy perspective*.

Rachmawati, A., & Siregar, R. (2023). *Penguatan basis data kemiskinan untuk perencanaan anggaran responsif*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi*, 11(3), 77–89.

RI., K. S. (2022). *Laporan nasional dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19*.

UNDP. (2021). *Social inclusion framework for local governance*.